



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Ardiyanto

Jabatan : Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Edi Prio Pambudi

Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi dan Investasi

Pihak Pertama,

Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi
Multilateral

Edi Prio Pambudi

Ferry Ardiyanto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Dukungan pada Tahapan Akses Indonesia ke OECD	1.1	Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD	30%
2.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	2.1	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20	90%
		2.2	Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) dan <i>Asia Zero Emission Community</i> (AZEC)	90%
3.	Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	3.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD dalam rangka akses Indonesia ke OECD	90%
		3.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional	85%
		3.3	Persentase efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) dan <i>Asia Zero Emission Community</i> (AZEC)	85%
4.	Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	4.1	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral	3 dari 4
5.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional	5.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	92%

Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Total

(Empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah)

Anggaran

Rp. 4.236.257.000,--

Rp. 4.236.257.000,-

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral



Ferry Ardiyanto